

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto Pasal 184, Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kedua Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tahun 2011 tentang Perubahan Menteri Dalam Negri Nomor 21 tebah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tentang Pedoman Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

c. berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembenukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Menginang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembenukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Menginang

BUPATI BENGKALIS,

TAHUN ANGGARAN 2016

PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS

PENGELUARAN PEMBANTU PELEKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA

TENTANG

NOMOR : 31 / KPTS / 1 / 2016
KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

B U P A T I B E N G K A L I S



KETIGA

- a. mengajukan permitaan pemasyarakatan mengeunaan SPP-TU
b. menemana dan menyimpulkan yang persediaan bersama datar
Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara
c. melaksanakan pemasyarakatan dari uang persediaan yang
dikelola;
d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
e. menetitia kelenkapan dokumen pendukung SPP-LS yang
dibentuk oleh PPTK; dan
- J. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
d. mengadakan ikatan/pengianian kejasaan dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
c. melakuakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pemasyarakatan;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
a. melakuakan tinjakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
dalam anggaran belanja;
: Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESTAU mempunyai tujuan
d. mengadakan ikatan/pengianian kejasaan dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
c. melakuakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pemasyarakatan;
J. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya
dan
h. mengajukan permintaan pemasyarakatan mengeunaan pada
benahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.

KEDUA

- : Mengajukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
kepada Benahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuanginan
Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Benengkalis
Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Diktum KESTAU mempunyai tujuan

Menetapkan : Mengajukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
kepada Benahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuanginan
Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Benengkalis
Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Diktum KESTAU mempunyai tujuan

Menetapkan : Mengajukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
kepada Benahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuanginan
Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Benengkalis
Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Diktum KESTAU mempunyai tujuan

Menetapkan : Mengajukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
kepada Benahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuanginan
Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Benengkalis
Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Diktum KESTAU mempunyai tujuan

Menetapkan : Mengajukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
kepada Benahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuanginan
Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Benengkalis
Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Diktum KESTAU mempunyai tujuan

Menetapkan : Mengajukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
kepada Benahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuanginan
Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Benengkalis
Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Diktum KESTAU mempunyai tujuan

Menetapkan : Mengajukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
kepada Benahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuanginan
Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Benengkalis
Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Diktum KESTAU mempunyai tujuan

Menetapkan : Mengajukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
kepada Benahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuanginan
Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Benengkalis
Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Diktum KESTAU mempunyai tujuan

Menetapkan : Mengajukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
kepada Benahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuanginan
Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Benengkalis
Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Diktum KESTAU mempunyai tujuan

Menetapkan : Mengajukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
kepada Benahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuanginan
Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Benengkalis
Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Diktum KESTAU mempunyai tujuan

KEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU berdasarkan Lingkungan Hidup
kepada Pengguna Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Bengkalis.
KELIMA : Segeala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini,
diubebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth
1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektor Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

Pj. BUPATI BENGKALIS
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 8 JANUARI 2016

H. AHMAD SYAH HARROFIE


f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberkati oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat
dan/atau tidak lengkap.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 31 / LCPTS / I / 2016
 TANGGAL : 8 JANUARI 2016

PEJAEAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN
2	3	4	5	6	7	
1	- AGUSRIZAL, M.Hum NIP. 197008021996011001	PEMBINA Tk. I (IV/a)	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup	Kuasa Pengguna Anggaran	1.08.1.08.01.01.002	1 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
	RUSNAH NIP. 197509142008012010	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Badan Lingkungan Hidup	Bendahara Pembantu Pengeluaran	1.08.1.08.01.01.006	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
					1.08.1.08.01.01.015	3 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan
					1.08.1.08.01.01.017	4 Penyediaan makanan dan minuman
					1.08.1.08.01.01.034	5 Publikasi Informasi Pembangunan
					1.08.1.08.01.02.026	6 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
					1.08.1.08.01.02.028	7 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
					1.08.1.08.01.03.011	8 Pengadaan Pakaian dan perlengkapan Petugas Lapangan
					1.08.1.08.01.05.001	9 Pendidikan dan Pelatihan Formal
					1.08.1.08.01.05.001	10 Penyusunan Rensra SKPD
					1.08.1.08.01.16.012	11 Penyusunan Kebijakan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (lanjutan)
					1.08.1.08.01.19.007	12 Penyelegaraan Peringatan hari lingkungan
					1.08.1.08.01.19.009	13 Penyelenggaran lomba bidang lingkungan hidup
					1.08.1.08.01.19.010	14 Peningkatan peran serta pemerintah daerah dalam rangka pameran bidang lingkungan hidup

1	2	3	4	5	6	7
2 - H. AFRIZAL, M.Hum NIP. 196605251989031006	Penata Tk. I (III/d) Kepala Bidang Pelestarian dan Pengembangan	Kuasa Pengguna Anggaran	1.08.1.08.01.16.001	1 Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura		
HERMAN NIP. 198407192005011007	Pengatur (II/c) Staf Badan Lingkungan Hidup	Bendahara Pembantu Pengeluaran	1.08.1.08.01.16.026 1.08.1.08.01.17.014 1.08.1.08.01.18.007	2 Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pelaksanaan program ADIWYATA 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihhan cadangan SDA		
3 - SYAHRIAL, SH NIP. 196212071984031008	Penata Tk. I (III/d) Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Dampak	Kuasa Pengguna Anggaran	1.08.1.08.01.16.013 1.08.1.08.01.16.017	1 Koordinasi Penyusunan Amdal 2 Upgrading Komisi Amdal		
ADE SETIAWATI NIP. 197812152010012002	Penata Muda Tk.I (II/b) Staf Badan Lingkungan Hidup	Bendahara Pembantu Pengeluaran	1.08.1.08.01.16.052 1.08.1.08.01.16.053 1.08.1.08.01.16.054 1.08.1.08.01.19.006 1.08.1.08.01.19.013 1.08.1.08.01.19.014 1.08.1.08.01.19.015	3 Verifikasi Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4 Inventarisasi dan Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis 5 Peningkatan Kemampuan Penanggung Jawab dan atau Kegiatan Dalam Penyusunan RKL RPL 6 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah (SLHD) 7 Optimalisasi Laboratorium BLH Kabupaten Bengkalis 8 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan 9 Monitoring pelaksanaan pengetiaan dan pemantauan lingkungan usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan		
4 - WAN GUSTINAWATI, S.Pi NIP. 196801201998032002	Pembina (IV/a) Kepala Bidang Penanggulangan dan	Kuasa Pengguna Anggaran	1.08.1.08.01.16.027 1.08.1.08.01.20.002	1 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 2 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri		
RINA WATI NIP. 197710072008012012	Penata Muda Tk.I (II/b)	Staf Badan Lingkungan Hidup	1.08.1.08.01.20.003 1.08.1.08.01.20.011	3 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 4 Pengujian emisi sumber bergerak / emisi kendaraan bermotor		

1	2	3	4	5	6	7
5 - Drs. FENI HAFZAN NIP. 196305181994031004	Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pemantauan dan Pemuliharaan Lingkungan	Kuasa Pengguna Anggaran	1.08.1.08.01.16.028	1 Penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan		
MULIZA NIP. 197808092007012002	Penata Muda Tk.I (II/b) Staf Badan Lingkungan Hidup	Bendahara Pembantu Pengeluaran	1.08.1.08.01.16.050 1.08.1.08.01.17.005 1.08.1.08.01.17.013 1.08.1.08.01.17.020 1.08.1.08.01.17.023 1.08.1.08.01.17.024 1.08.1.08.01.20.010 1.08.1.08.01.20.012 1.08.1.08.01.22.014 1.08.1.08.01.22.016	2 Inventarisasi dan Sosialisasi Pemantauan Pembuangan Oli Bekas Pada Bengkel Kendaraan 3 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 4 Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 5 Sosialisasi dan inventarisasi kegiatan / usaha yang menggunakan bahan perusak ozon (PBO) 6 Optimalisasi program Kampung Iklim 7 Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) 8 Pelatihan dan sertifikasi bengkel ramah lingkungan (Bengkel yang menggunakan PBO) 9 Sosialisasi peningkatan peran serta usaha./atau kegiatan dalam pemuliharaan lingkungan 10 Optimalisasi pemantauan kualitas udara 11 Sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	1 Penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan	

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE